

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Arto, A.Mukti. 1998. *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3. Jakarta : Rineka Cipta.

Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri:Jam'iyah Musyawarah PP Al Falah,2011).

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman," dalam Departemen Agama, *Himpunan Peraturan PerUndang Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Proyek , 2004.

Amir Syarifuddin. 2003. *Garis- Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Amiur Nurudin dan Azhar A Tarigan. 2006. *Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana.

Adi Sufriadi, 2015, *Materi Prosedure dan Pedoman Beracara yang berkaitan dengan Perkara Nikah, Rujuk, Talak dan Cerai di Pengadilan Agama*, dalam Acara Pembinaan Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah dan Rujuk pada KUA, bertempat di Aula Kantor Kemenag Karimum.

Asriani dan Lukman Ilham, *Peranan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep*,

Ali Muhtarom, 2016, *Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, 'Anil Islam, *Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 9 (2), Hal. 2.

Bibit Suprpto. (1990). *Liku liku poligami / Bibit Suprpto*. Yogyakarta :: Al-Kautsar.,. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012),

Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Raja Graaindo Persada, 2000), Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h.12

Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002,

Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita), (Malang: UIN- Malang Press, 2009).

Edi As'adi, 2012, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Cetakan Ke-1, Yogyakarta.

H.M.A, Tihami. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

H. A. Khisni, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XXV, No. 1, April 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukumkeluarga*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

M. Yahya Harahap - Personal Name. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional : Berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*.

Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. (Jakarta:Sinar Grafika,2013).

Marjiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Mohammad Daud Ali, 1996, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*, dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed), *Tradisi dan*

Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, terjemahan oleh Rochman

Munir Fuad, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-1.

Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Cet, Ke-2.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-7. Jakarta : PT Bumi Aksara

Ramulyo, Mohd. I. (n.d.). Hukum perkawinan Islam: suatu analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet ke-20. Jakarta: PT Intermedia.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada, Jakarta, Cet.Ke-2.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta : CV Andi Offset

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Website

Masamba. (n.d.). HAK – HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN.

Retrieved from <https://pa-masamba.go.id/index.php/layanan-publik/hak-hak-perempuan-dan-anak>

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Pasal 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

